

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
TAHUN 2021**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan SKPD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran, Tanggal Januari 2021 Telah disusun

Laporan Keuangan ini disusun sebagai Implementasi dari amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan eraturan – Peraturan Perundangan Lainnya yang menyangkut tentang tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan ini disampaikan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dimana menggambarkan Anggaran Tahun 2020 dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahn Ekuitas, dan laporan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 yang berkenaan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaoporan, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang Menyajikan Informasi tentang pos-pos Laporan Keuangan dala rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenal dasar penyusunan laporan keuangan, kewajiban akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggran 2020 adalah basisi akrual untuk Penagkuan Pendapatan-LO dan Beban, Maupun pengakuan Aset, kewajiban dan Ekuitas. Basisi Kas untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Belanja.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu per Januari 2021 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Khususnya di Pemerintah Pasangkayu.

Terima Kasih.

Pasangkayu, Januari 2021
Pengguna Anggaran ;



ZULFIKAR, K. SP

Nip. 19730625 200312 1 010

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan catatan atas laporan keuangan secara layak serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Pernyataan ini Kami Buat dengan untuk dipergunakan Seperlunya.

Pasangkayu, Januari 2021
Pengguna Anggaran



ZULFIKAR, K. SP

Nip. 19730625 200312 1 010

Neraca, LRA, LO, LPE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Unsur Laporan Keuangan
1. 4. Sistematisasi Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKSANAAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

2. 1. Ekonomi Makro
2. 2. Kebijakan Keuangan
2. 3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3. 2. Hambatan dan Kendala

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5. 1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5. 2. Penjelasan Laporan Operasional
5. 3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5. 4. Penjelasan Pos – Pos Neraca

BAB VI PENUTUP

LAMPIRA – LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai Salahsatu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintah yang baik atau *good governace*. Sedangkan tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Menggambarkan perbandingan antara Anggaran tahun 2020 dengan realisasi, Mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari satuan entitas yang penyajiannya disandingkan dengan Periode sebelumnya

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri ekuitas awal, surplus/deficit-LO, Koreksi dan ekuitas akhir

d. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5156);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2003 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggran 2020;
18. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggran 2020.

1. 3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Merupakan Laporan Yang Mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, Yang Terdiri atas;

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. 4. Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, anatar lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekomendasi dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu disajikan dengan urutan sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Unsur Laporan Keuangan
1. 4. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKSANAAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2. 1. Ekonomi Makro
2. 2. Kebijakan Keuangan
2. 3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3. 2. Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5. 1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5. 2. Penjelasan Laporan Operasional
5. 3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5. 4. Penjelasan Pos – Pos Neraca

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu. Pemerintah Daerah melakukan Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi pelayanan Administrasi Perkantoran dan Umum serta Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas.

2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk Pencapaian Target kinerja tahun anggaran 2020, SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum di Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, di mana darimasing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-Program APBD SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang di laksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah'
- e. Program Pengembangan Perumahan;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Memperoleh Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara Keseluruhan sebesar **Rp. 7.563.399.791** Yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasional	4.762.283.096,00
2.	Belanja Modal	2.801.116.695,00
JUMLAH		7.563.399.791,00

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Pendapat			
	- Pendapatan Asli Daerah	0	0	0,00
2.	Belanja			
	- Belanja Operasi	4.762.283.096,00	4.702.713.081,00	98,75
	- Belanja Modal	2.801.116.695,00	2.189.787.200,00	78,18
JUMLAH		7.563.399.791,00	6.892.500.281,00	91,13

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Belanja Daerah

Realisasi belanja untuk program kegiatan sampai akhir tahun 2020 sebesar **Rp. 7.304.384.786,00** atau Mencapai **96.93 %** yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	Realisasi	%
1	2	3	4	
1.	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.627.294.531,00	1.627.294.531,00	100,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	272.400.000,00	254.638.620,00	93,48
2.	Belanja Langsung			
	Belanja Honorarium PNS	75.360.000,00	75.360.000,00	100,00
	Belanja Honorarium Non PNS	28.960.000,00	28.960.000,00	100,00
	Belanja Bahan Habis Pakai	89.334.025,00	85.302.850,00	95,49

	Belanja Bahan/Material	0	0	0
	Belanja Jasa Kantor	245.813.190,00	221.617.902,00	90,16
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.250.000,00	18.849.100,00	60,32
	Belanja Cetak dan Pengadaan	13.977.750,00	13.887.500,00	99,35
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0
	Belanja Makan dan Minum	24.440.000,00	24.440.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	290.953.600,00	289.987.578,00	99,67
	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.875.000,00	99,17
	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0	0	0
	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.047.500.000,00	2.047.500.000,00	100,00
3.	Belanja Modal			
	Belanja modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.517.405.000,00	1.911.878.500,00	75,95
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga	63.392.500,00	62.650.000,00	98,83
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	78.131.195,00	76.858.700,00	98,37
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.888.000,00	41.200.000,00	91,78
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan	97.300.000,00	97.200.000,00	99,90
	Total	7.563.399.791,00	6.892.500.281,00	91,13

Untuk Realisasi Keseluruhan Belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp. 6.892.500.281,00** atau sebesar **91,13%**. Pada Realisasi Total Belanja ini, nilai realisasi yang di dapat sangat baik dikarenakan penyerapan anggaran yang hamper sesuai dengan apa yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga efektifitas anggaran pada tahun 2020 pun tercapai. Anggaran yang tidak terpakai sebagian besar merupakan bentuk dari efisiensi anggaran tahun 2020 yakni sebesar **Rp. 670.899.510,00**

3. 2. Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan akan kinerja dan penganggaran yang masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya klinik keuangan dan aset, belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai, belum adanya Gudang penyimpanan persediaan ATK dan Penyimpanan Barang Milik Daerah, Serta banyaknya peralatan perkantoran yang rusak
4. Koordinasi dan Singkronisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggung jawabannya. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Entitas Akuntansi adalah Unit pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, demikian juga dengan periode tahun sebelumnya. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2017.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas dan sebaiknya bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penerapan basis akrual pertamakalinya, juga menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Pendapatan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA Adalah semua permintaan Rekening Kas Umum Daerah Yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

b. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang Mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang di perlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PEJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. 1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Belanja

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasional dan Belanja Modal. Dalam Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Pasangkayu Terdapat beberapa belanja yakni Pegawai Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

Alokasi Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sebesar **Rp. 7.563.399.791,00** Yang terbagi kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat Anggaran Sebesar **Rp. 1.899.694.531,00** dan Belanja Langsung Sebesar **Rp. 5.663.705.260,00**. Pertanggal 31 Desember 2020, Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp6.892.500.281,00** atau sebesar **91,13%** dari total anggaran yang ada.

Anggaran dan Realisasi belanja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Meliput Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2020 sebesar **Rp. 3.155.713.644,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	2.004.014.531,00	1.986.253.151,00	1.992.267.227,00
2	Belanja Subsidi			
3	Belanja Barang dan Jasa	2.758.268.565,00	2.716.459.930,00	1.163.446.417,00
4	Belanja Hibah			
Jumlah		4.762.283.096,00	4.702.713.081,00	3.155.713.644,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Meliputi Peralatan dan Mesin, Perlengkapan, Komputer, dan Belanja Modal Tanah untuk bangunan gedung serta alat-alat lainnya dengan realisasi tahun 2020 **Rp. 2.189.787.200,00**Rincian Belanja Modal tersebut, Sebagai Berikut :

No	Belanja Operasi	Anggran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	2.517.405.000,00	1.911.878.500,00	3.932.016.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.411.695,00	180.708.700,00	114.877.600,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air	97.300.000,00	97.200.000,00	101.777.542,00
Jumlah		2.801.116.695,00	2.189.787.200,00	4.148.671.142,00

5. 2. Penjelasan Laporan Oprasional

a. Pendapatan LO

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan – LO pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan, rincian pendapatan LO tersebut Sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan asli Daerah (PAD) LO	0	0
2	Pendapatan Transfer LO	0	0
3	Lain Lain pendapatan Daerah yang Sah LO	0	56.374.979.220,00
Jumlah		0	56.374.979.220,00

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi komsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban dikalsifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social,

bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama tahun 2020 beban pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu adalah sebesar **Rp. 8.067.050.847,00** dan apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019 sebesar **Rp. 15.960.474.822,00**. Mengalami penurunan senilai **Rp. 7.893.423.975,00** atau 49,46%

Beban

1. Beban Pegawai

Beban pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar **Rp. 1.986.253.151,00** dan apabila dibandingkan dengan pegawai pada tahun 2019 yaitu Sebesar **Rp. 1.992.267.227,00** mengalami kenaikan Sebesar **Rp. 6.014.076,00**

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 123.801.350,00** apabila dibandingkan beban Persediaan tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 217.965.700,00** Maka mengalami Penurunan sebesar **Rp. 49.164.350,00**

3. Beban Jasa

Beban Jasa dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 2.269.117.902,00** apabila dibandingkan beban Jasa tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 266.235.811,00** Maka mengalami kenaikan sebesar **Rp. 2.002.882.091,00** Atau Naik 88,27%

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 33.724.100,00** apabila dibandingkan beban Jasa tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 30.091.150,00** Maka mengalami kenaikan sebesar **Rp. 3.632.950,00** Atau Naik 10,77%

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas, dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 289.987.578,00** apabila dibandingkan beban Jasa tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 409.990.536,00** Maka mengalami Penurunan sebesar **Rp. 120.002.958,00** Atau Turun 41,38%

6. Beban Hibah

Beban Hibah, dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 0,00** apabila

dibandingkan beban Jasa tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 1.946.690.220,00** Maka mengalami Penurunan sebesar **Rp. 1.946.690.220,00** Atau Turun 100 %

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu pada tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 3.261.621.048,00** Apabila dibandingkan beban Penyusutan tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 11.097.234.160,00** mengalami penurunan sebesar **Rp 7.835.613.112,00**

8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu pada tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar **Rp. 102.545.718,00** Apabila dibandingkan beban Penyusutan tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 18,00** mengalami Kenaikan sebesar **Rp 102.545.700,00**

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan / Penurunan	%
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	Beban				
	Beban Pegawai - LO	1.986.253.151,00	1.992.267.227,00	-6.014.076,00	0,30 %
	Beban Persediaan	123.801.350,00	217.965.700,00	-94.164.350,00	76,06%
	Beban Jasa	2.269.117.902,00	266.235.811,00	2.002.882.091,00	88,27%
	Beban Pemeliharaan	33.724.100,00	30.091.150,00	3.632.950,00	10,77%
	Beban Perjalanan Dinas	289.987.578,00	409.990.536,00	-120.002.958,00	41,38%
	Beban Hibah	0	1.946.690.220,00	-1.946.690.220,00	100,00%
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.261.621.048,00	11.097.234.160,00	-7.835.613.112,00	240,24%
	Beban Lain - Lain	102.545.718,00	18,00	102.545.700,00	100,0%
	Jumlah	8.067.050.847,00	15.960.474.822,00	-7.893.423.975,00	-97,85%

9. Surplus / Defisit Laporan Operasional

Dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020, Berdasarkan realisasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2020 Sebesar **Rp. 0,00**, dan Realisasi baban **Rp. 8.067.050.847,00** Maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Mengalami Defisit Sebesar **Rp. 8.067.050.847,00**. Defisit ini terjadi dikarenakan tidak adanya Pendapatan LO.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponene Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar **Rp 125.901.309.903,00** Nilai ini Merupakan Ekuitas Akhir, Pada Tahun 2019 Adalah Sebesar **Rp 125.901.309.903,00**

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar - **Rp 8.067.050.847,00** Sedangkan pada tahun 2019 adalah Sebesar - **Rp 40.414.504.398,00** Ini yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

3. Mutasi Aset Tetap

Mutasi Aset tetap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar **Rp. 242.254.171,00** sedangkan pada tahun 20189 adalah sebesar **Rp 2.140.280.936,00**

4. Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi Ekuitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar - **Rp. 0,00** sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar - **Rp 0,00**

5. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasi Diknas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar **Rp 6.892.500.281,00** sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp 7.304.384.786,00**

6. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Merupakan Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2019. Koreksi-koreksi bernilai - **Rp. 0,00**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 adalah Sebagai Berikut :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
		2020
1	2	3
1	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	
1	Koreksi Nilai Persediaan	
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
4	Mutasi Aset Tetap	242.254.171,00
5	Koreksi Terhadap Utang	
6	Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi	
7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.892.500.281,00
8	Ekuitas Akhir	124.969.013.508,00

7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah Sebesar **Rp 124.969.013.508,00** Apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir Tahun 2019 Sebesar **Rp 125.901.309.903,00**

5. 4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Aset Lancar	169.000	340.000,00
2	Investasi Jangka Panjang		
3	Aset Tetap	124.959.894.497,00	125.798.424.185,00
4	Dana Cadangan		
5	Aset Lainnya	8.950.011	102.545.719,00
	Jumlah	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu tahun 2019, Adalah sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas di Bendahara Penerima	0	0
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
3	Kas di BLUD	0	0
4	Kas Lainnya	0	0

5	Setara Kas	0	0
6	Investasi Jangka Panjang	0	0
7	Piutang Pendapatan	0	0
8	Piutang Lainnya	0	0
9	Penyisihan Piutang	0	0
10	Beban Diabayar Dimuka	0	0
11	Persediaan	169.000,00	340.000,00
Jumlah		169.000,00	340.000,00

Kas di Bendahara Penerima

Saldo Kas di Bendahara Penerima Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Kas Lainnya

Saldo Kas di Bendahara Penerima Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Setara Kas

Saldo Pada Setara Kas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Investasi Jangka Pendek

Saldo Pada Investasi Jangka Pendek Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban yang Dibayar Dimuka Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2020, Sebesar **Rp. 169.000** Berupa Persediaan Alat Tulis Kantor

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Pendek Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
2	Investasi Jangka Panjang Permanene	0	0
	Jumlah	0	0

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, Adalah Sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tanah	76.176.041.579,00	74.264.163.079,00
2	Peralatan dan Mesin	1.370.940.013,00	970.934.142,00
3	Gedung dan Bangunan	63.289.643.896,00	63.289.643.896,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	318.907.542,00	221.707.542,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi Penyusut	-16.200.638.533,00	-12.953.024.474,00
	Jumlah	124.959.894.497,00	125.798.424.185,00

Tanah

Saldo Tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 76.176.041.579,00**

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 1.370.940.013,00**, bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan mesin, serta mutase aset peralatan dan mesin dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah serat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 63.289.643.896,00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jalan Irigasi dan Jaringan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2019 Sebesar **Rp 318.907.542,00**, Penambahan Bersumber dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2020

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2019 Sebesar **Rp 5.000.000,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2019 Sebesar **Rp 0**

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2019 Sebesar – **Rp 16.200.638.533,00**

4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2019 sebesar **Rp 0**

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dana Cadangan	0	0
	Jumlah	0	0

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, Adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0	0
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
3	Aset Tidak Terwujud	0	0
4	Aset Lain-lain	8.950.011,00	102.545.719,00
Jumlah		8.950.011,00	102.545.719,00

Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 0**

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Pada Kemitraan Dengan Pihak Ketiga di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 0**

Aset Tidak Terwujud

Saldo Aset Tidak Terwujud Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 0**

Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 8.950.011,00**

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, Adalah Sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Utang Bunga	0	0
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
5	Utang Beban	0	0
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 0**

Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 0**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai Saldo Pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Utang Beban

Saldo Utang Beban Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka panjang Lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, Adalah Sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0	0
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp. 0**

3. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, Adalah Sebagai Berikut :

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Ekuitas	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00
Jumlah		124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

Nilai Saldo pada Ekuitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2020 Sebesar **Rp 124.969.013.508,00** dan Pada Tahun 2018 Sebesar **Rp 125.901.309.903,00**

4. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Kewajiban dan Ekuitas Dana Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kewajiban dan Ekuitas	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00
Jumlah		124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

BAB VI

PENUTUP

Pada akhir catatan atas laporan keuangan (CaLK) SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 ini, ada Beberapa hal yang penting yang harus disampaikan berkenaan dengan laporan keuangan SKPD tiap akhir tahun anggaran. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, telah disusun berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar **91,13%** dan sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 , sedangkan Beban Operasionalnya sebesar **Rp. 8.067.050.847,00** yang menyebabkan defisit, sehingga Jumlah Tota Aset Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 124.969.013.508,00**



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	169.000,00	340.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	169.000,00	340.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	76.176.041.579,00	74.264.163.079,00
Peralatan dan Mesin	1.370.940.013,00	970.934.142,00
Gedung dan Bangunan	63.289.643.896,00	63.289.643.896,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	318.907.542,00	221.707.542,00
Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-16.200.638.533,00	-12.953.024.474,00
JUMLAH ASET TETAP	124.959.894.497,00	125.798.424.185,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	8.950.011,00	102.545.718,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.950.011,00	102.545.718,00
JUMLAH ASET	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
URAIAN	2020	2019
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Utang Dana Desa	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

TTD →



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN REALISASI ANGGRAB PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	7.563.399.791,00	6.892.500.281,00	91,13%	7.304.384.786,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	4.762.283.096,00	4.702.713.081,00	98,75%	3.155.713.644,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.004.014.531,00	1.986.253.151,00	99,11%	1.992.267.227,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.758.268.565,00	2.716.459.930,00	98,48%	1.163.446.417,00
5 . 2	BELANJA MODAL	2.801.116.695,00	2.189.787.200,00	78,18%	4.148.671.142,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.517.405.000,00	1.911.878.500,00	75,95%	3.932.016.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.411.695,00	180.708.700,00	96,94%	114.877.600,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	97.300.000,00	97.200.000,00	99,90%	101.777.542,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(7.563.399.791,00)	(6.892.500.281,00)	91,13%	(7.304.384.786,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.563.399.791,00)	(6.892.500.281,00)	91,13%	(7.304.384.786,00)

Pasangkayu, 31 Desember 2020

PENGGUNA ANGGARAN

ZULFIKAR K. SP

NIP. 19730625200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.04		Usuran Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Unit Organisasi : 1.04.01		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
N/O. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	-	56.374.979.220,00	(56.374.979.220,00)	#DIV/0!
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dijsahkan - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	56.374.979.220,00	(56.374.979.220,00)	#DIV/0!
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	-	56.374.979.220,00	(56.374.979.220,00)	#DIV/0!
8.3.2	Dana Darurat - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	#DIV/0!
9	BEBAN	8.067.050.847,00	15.960.474.822,00	(7.893.423.975,00)	-97,85%
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.986.253.151,00	1.992.267.227,00	(6.014.076,00)	-0,30%
9.1.2	Beban Persediaan	123.801.350,00	217.965.700,00	(94.164.350,00)	-76,06%
9.1.2	Beban Jasa	2.269.117.902,00	266.235.811,00	2.002.882.091,00	88,27%
9.1.2	Beban Pemeliharaan	33.724.100,00	30.091.150,00	3.632.950,00	10,77%
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	289.987.578,00	409.990.536,00	(120.002.958,00)	-41,38%
9.1.3	Beban Bunga	-	-	-	#DIV/0!
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	#DIV/0!
9.1.5	Beban Hibah	-	1.946.690.220,00	(1.946.690.220,00)	#DIV/0!
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	#DIV/0!
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.261.621.048,00	11.097.234.160,00	(7.835.613.112,00)	-240,24%
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
9.1.9	Beban Lain-lain	102.545.718,00	18,00	102.545.700,00	100,00%
9.1.10	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	#DIV/0!

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
9.1.11	Beban Bagi Hasil - LO		-	-	#DIV/0!
9.1.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.067.050.847,00)	40.414.504.398,00	(48.481.555.245,00)	600,98%
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				#DIV/0!
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	#DIV/0!
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.3.3	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.067.050.847,00)	40.414.504.398,00	(48.481.555.245,00)	600,98%
	POS LUAR BIASA				#DIV/0!
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.4.1	Beban Luar Biasa	-	-	-	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.067.050.847,00)	40.414.504.398,00	(48.481.555.245,00)	600,98%
					#DIV/0!

Pasangkayu, 31 Desember 2020

PENGUNA ANGGARAN


ZULFIKAR, M. SP

NIP. 19730625200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN REALISASI ANGRAB PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2020		LEBIH/(KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	
Urusan Pemerintahan	: 1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
Sub Unit Organisasi	: 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
BELANJA		7.563.399.791,00	-	6.892.500.281,00	(670.899.510,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.899.694.531,00	-	1.881.933.151,00	(17.761.380,00)
Belanja Pegawai		1.899.694.531,00	-	1.881.933.151,00	(17.761.380,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan		1.627.294.531,00	-	1.627.294.531,00	-
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		1.266.655.433,00	-	1.266.655.433,00	-
Belanja Tunjangan Keluarga		109.331.116,00	-	109.331.116,00	-
Belanja Tunjangan Jabatan		138.045.000,00	-	138.045.000,00	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum		41.070.000,00	-	41.070.000,00	-
Belanja Tunjangan Beras		71.695.800,00	-	71.695.800,00	-
Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus		478.785,00	-	478.785,00	-
Belanja Pembulatan Gaji		18.397,00	-	18.397,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS		272.400.000,00	-	254.638.620,00	(17.761.380,00)
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja		272.400.000,00	-	254.638.620,00	(17.761.380,00)
BELANJA LANGSUNG		5.663.705.260,00	-	5.010.567.130,00	(653.138.130,00)
Belanja Pegawai		104.320.000,00	-	104.320.000,00	-
Honorarium PNS		75.360.000,00	-	75.360.000,00	-
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa		-	-	-	-
Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan		60.960.000,00	-	60.960.000,00	-
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		14.400.000,00	-	14.400.000,00	-
Honorarium Non PNS		28.960.000,00	-	28.960.000,00	-
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		28.960.000,00	-	28.960.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa		2.758.268.565,00	-	2.716.459.930,00	(41.808.635,00)
Belanja Bahan Pakai Habis		89.334.025,00	-	85.302.850,00	(4.031.175,00)
Belanja Alat Tulis Kantor		75.705.400,00	-	71.692.650,00	(4.012.750,00)
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya		4.614.000,00	-	4.614.000,00	-
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		5.014.625,00	-	4.996.200,00	(18.425,00)
Belanja Bendera/Umbul/Umbul/Lambang		4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
Belanja Bahan/Material		-	-	-	-
Belanja Bahan Baku Bangunan		-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2020		LEBIH/(KURANG)	
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI		TOTAL
5.1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
5.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
5.1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
5.2.1	Belanja Jasa Kantor	245.813.190,00	221.617.902,00	221.617.902,00	(24.195.288,00)	
5.2.1	Belanja Listrik	36.000.000,00	-	23.219.832,00	(12.780.168,00)	
5.2.1	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.160.000,00	-	7.005.000,00	(1.155.000,00)	
5.2.1	Belanja Kawat/Faksimili/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	58.608.000,00	-	54.648.000,00	(3.960.000,00)	
5.2.1	Belanja Sertifikasi	30.673.190,00	-	24.373.070,00	(6.300.120,00)	
5.2.1	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
5.2.1	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pamateri	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	
5.2.1	Belanja Jasa Fasilitator	60.372.000,00	-	60.372.000,00	-	
5.2.1	Belanja Jasa Moderator/MC/Penari	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	
5.2.1	Belanja Biaya Transportasi Darat	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
5.2.1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.250.000,00	-	18.849.100,00	(12.400.900,00)	
5.2.1	Belanja Jasa Service	21.000.000,00	-	11.750.000,00	(9.250.000,00)	
5.2.1	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	
5.2.1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	-	599.100,00	(3.150.900,00)	
5.2.1	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.977.750,00	-	13.887.500,00	(90.250,00)	
5.2.1	Belanja Cetak	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	
5.2.1	Belanja Penggandaan	7.577.750,00	-	7.536.250,00	(41.500,00)	
5.2.1	Belanja Penjilidan (+Cover)	2.500.000,00	-	2.451.250,00	(48.750,00)	
5.2.1	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	
5.2.1	Belanja Sewa Meja Kursi	-	-	-	-	
5.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	24.440.000,00	-	24.440.000,00	-	
5.2.1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	
5.2.1	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	16.640.000,00	-	16.640.000,00	-	
5.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	290.953.600,00	-	289.987.578,00	(966.022,00)	
5.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.753.100,00	-	149.989.600,00	(763.500,00)	
5.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.200.500,00	-	139.997.978,00	(202.522,00)	
5.2.1	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	-	14.875.000,00	(125.000,00)	
5.2.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
5.2.1	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	15.000.000,00	-	14.875.000,00	(125.000,00)	
5.2.1	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	-	-	-	-	
5.2.1	Belanja Hibah Barang atau Jasa Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	-	-	-	-	
5.2.1	Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	2.047.500.000,00	-	2.047.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2020		LEBIH/(KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.2.1	Belanja Hibah Barang atau Jasa Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	2.047.500.000,00	-	2.047.500.000,00	-
5.2.1	Belanja Modal	2.801.116.695,00	-	2.189.787.200,00	(611.329.495,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.517.405.000,00	-	1.911.878.500,00	(605.526.500,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	-
5.2.1	Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Kosong	2.517.405.000,00	-	1.911.878.500,00	(605.526.500,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	-
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.392.500,00	-	62.650.000,00	(742.500,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair	28.552.500,00	-	27.810.000,00	(742.500,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin	34.840.000,00	-	34.840.000,00	-
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer	78.131.195,00	-	76.858.700,00	(1.272.495,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer	57.669.245,00	-	56.462.200,00	(1.207.045,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Kor	20.461.950,00	-	20.396.500,00	(65.450,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Ra	44.888.000,00	-	41.200.000,00	(3.688.000,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	35.288.000,00	-	31.600.000,00	(3.688.000,00)
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-
5.2.1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan	97.300.000,00	-	97.200.000,00	(100.000,00)
5.2.1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Desa	97.300.000,00	-	97.200.000,00	(100.000,00)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(7.563.399.791,00)	-	(6.892.500.281,00)	670.899.510,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.563.399.791,00)	-	(6.892.500.281,00)	670.899.510,00

Pasangkayu, 31 Desember 2020

PENGUNA ANGGARAN

Sterpa

ZULFIKAR, K.SP

NIP. 19730624200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	125.901.309.903,00	76.042.139.783,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-8.067.050.847,00	40.414.504.398,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Mutasi Aset Tetap	242.254.171,00	2.140.280.936,00
Koreksi Terhadap Utang	0,00	0,00
Koreksi Saldo Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Terhadap Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.892.500.281,00	7.304.384.786,00
EKUITAS AKHIR	124.969.013.508,00	125.901.309.903,00

Pengguna Anggaran



ZULFIKAR. K. SP
NIP. 19730625200312 1 010

standel